



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.716, 2010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pelimpahan.
Urusan Pemerintahan.

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 66 TAHUN 2010
TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN
PEMERINTAHAN
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011, sebagian urusan pemerintahan perlu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi, dan ditugaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Tugas Pembantuan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Eselon I Pembina adalah Unit Organisasi/komponen Pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.
2. Eselon II Pembina adalah Unit Kerja yaitu Biro/Pusat/Direktorat pada unit Eselon I Pembina yang bertanggungjawab atas teknis pembinaan kegiatan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain, untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
5. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
6. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di bidang tertentu di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
9. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis

Kementerian Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
13. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN DAN DITUGASKAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011, dapat dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melalui dekonsentrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011, dapat ditugaskan kepada gubernur/bupati/walikota melalui tugas pembantuan.
- (3) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi.

- (2) Lingkup urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran tugas pembantuan.
- (3) Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai RKP, Renja-KL, dan RKA-KL.

Pasal 4

- (1) Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah.
- (2) Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
 - b. meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dalam mendukung reformasi birokrasi dan pemantapan demokrasi;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat perdesaan;
 - d. meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan; dan
 - e. meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Program dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri;
 - b. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
 - c. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - d. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
 - e. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemendagri; dan
 - f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Program tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. Program Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
 - b. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. Program Bina Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini

Pasal 7

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam RKA-KL dan DIPA.
- (2) Tata cara penyusunan RKA-KL dan DIPA serta penetapan/pengesahannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan unit eselon I Pembina, gubernur, dan bupati/walikota.
- (2) Unit eselon I Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan unit eselon II dan para SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas Pembantuan di daerah.
- (3) Unit eselon II Pembina mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), gubernur dan bupati/walikota wajib:

- a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. menetapkan SKPD dan menyiapkan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan; dan
 - c. melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Gubernur dan bupati/walikota mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran dan pertanggung jawaban keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.
- (2) Gubernur menugaskan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek perencanaan, penatausahaan anggaran, pencapaian realisasi anggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan penetapan dari gubernur.
- (2) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan penetapan dari gubernur atau bupati/walikota.
- (3) Penetapan SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi
Pasal 12

Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dibentuk pejabat perbendaharaan yang meliputi:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan
- d. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a selaku Pejabat perbendaharaan kegiatan dekonsentrasi ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pejabat yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD atau Pejabat lain dengan eselonering satu tingkat dibawah Kepala SKPD dalam lingkup SKPD.

Pasal 14

Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah Pejabat dengan eselonering satu tingkat dibawah Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD.

Pasal 16

Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup SKPD yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pasal 17

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dibentuk pejabat perbendaharaan yang meliputi:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar; dan
- d. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 18

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan dari gubernur/bupati/walikota yang menerima penugasan.
- (2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Unit Eselon I Pembina atas nama Menteri dengan Surat Keputusan Menteri.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD atau Pejabat lain dengan eselonering satu tingkat dibawah Kepala SKPD dalam lingkup SKPD.

Pasal 19

Menteri mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah Pejabat dengan eselonering satu tingkat dibawah Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD.

Pasal 21

Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dan huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup SKPD yang memenuhi persyaratan.

Pasal 22

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pembantu bendahara di luar Lingkup SKPD.
- (2) Penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Besaran kegiatan dan anggaran yang dikelola;
 - b. Sumber pendanaan; dan
 - c. Lokasi kegiatan.
- (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat dengan eselonering satu tingkat dibawah Pejabat Pembuat Komitmen.
 - (4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 23

- (1) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), memuat tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. menyusun dan menandatangani DIPA berdasarkan RKA-K/L yang disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Unit Eselon I Pembina; dan
 - b. menyusun dan menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
- (2) Penyusunan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Eselon I Pembina, Sekretariat Jenderal dan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat satu bulan setelah diterimanya pengesahan DIPA dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 24

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-KL yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Bagian Ketiga
Revisi DIPA dan Mekanisme Penyaluran Dana

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan DIPA tugas pembantuan, dapat dilakukan revisi anggaran.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian anggaran meliputi penambahan atau pengurangan rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran berubah.
- (3) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berupa perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
- (4) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk DIPA dekonsentrasi dan DIPA tugas pembantuan.
- (2) Penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.
- (3) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun laporan manajerial.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;

- c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan dan laporan barang.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. neraca;
 - b. realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan
- (4) Penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BARANG HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 31

- (1) Barang yang dibeli dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang milik negara.
- (2) Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Tata cara hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 66 Tahun 2010
 TANGGAL : 31 Desember 2010

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
 LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2011
 UNTUK MASING-MASING PROVINSI**

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	<u>Rp 68.153.216.000</u>	
	a. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran	-	
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 175.000.000	
	b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 222.000.000	
	b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 479.932.000	
	3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pengurangan Resiko Bencana di Aceh-DRRA	Rp 4.168.200.000	
	c. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 183.107.000	
	d. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD		
	a) Transformasi Pemerintahan Aceh-AGTP	Rp 20.200.000.000	
	e. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 75.000.000	
	4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 530.000.000	
	5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 41.426.427.000	
	6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 93.550.000	
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	<u>Rp 30.329.479.000</u>	
	a. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	2) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi		
	a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government	Rp 176.215.000	
	b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 259.640.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 300.000.000	
	b) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 620.247.000	
	3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	c. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 360.308.000	
	d. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD		
	a) Transformasi Pemerintahan Daerah di Kepulauan Nias-NITP	Rp 5.200.000.000	
	2) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP		
	e. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 75.000.000	
	4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 1.177.130.000	
	5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 21.045.399.000	
	6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 97.940.000	
	f. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 217.600.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	<u>Rp 11.701.943.000</u>	
	a. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 225.000.000	
	b. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 242.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 300.000.000	
	3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 750.000.000	
	c. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 179.655.000	
	d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 125.000.000	
	4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 9.092.578.000	
	6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 87.710.000	
	e. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 150.000.000	
4.	PROVINSI RIAU	<u>Rp 7.682.195.000</u>	
	a. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 247.000.000	
	b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 343.736.000	
	b) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga	Rp 250.000.000	
	3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	c. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 252.394.000	
	d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 5.152.325.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 86.740.000	
5.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	<u>Rp 6.195.604.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 195.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 236.880.000	
	b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan	Rp 200.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga	Rp 300.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 149.848.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 4.279.936.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 86.140.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 197.800.000	
6.	PROVINSI JAMBI	Rp 8.638.377.000	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 226.490.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 200.000.000	
	b) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 251.968.000	
	3) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan		
	a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam	Rp 400.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 140.172.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 1.066.140.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 5.635.607.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 85.000.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 133.000.000	
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	<u>Rp 12.551.835.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	2) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi		
	b) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government	Rp 231.650.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 240.536.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 179.595.000	
	d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP	Rp 2.758.221.000	
	e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 810.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 7.595.463.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 84.070.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 152.300.000	
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	<u>Rp 4.440.021.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 195.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaran Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 217.464.000	
	b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan	Rp 200.000.000	
	2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 126.210.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 514.890.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 2.341.317.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 84.040.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 161.100.000	
9.	PROVINSI BENGKULU	<u>Rp 8.855.508.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 240.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 215.696.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 200.000.000	
	b) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 230.470.000	
	3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 750.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 151.374.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 100.000.000	
	4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
	5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 6.188.868.000	
	6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 85.100.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 144.000.000	
10.	PROVINSI LAMPUNG	<u>Rp 14.026.340.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 225.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 227.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 339.942.000	
	d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP	Rp 2.591.328.000	
	e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 810.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 9.304.200.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 84.070.000	
	f) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 144.800.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
11.	PROVINSI BANTEN	<u>Rp 11.068.992.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 212.000.000	
	b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 332.054.000	
	d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	b) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP	Rp 2.076.640.000	
	e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa		
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 200.000.000	
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 7.188.248.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 81.850.000	
	f) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 128.200.000	
12.	PROVINSI DKI JAKARTA	<u>Rp 320.188.000</u>	
	a) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 157.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 163.188.000	
13.	PROVINSI JAWA BARAT	<u>Rp 29.445.613.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 225.000.000	
	2) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi		
	a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government	Rp 142.755.000	
	b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 247.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 200.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 832.398.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 1.048.100.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 810.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 25.409.360.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 92.000.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 139.000.000	
14.	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp 28.106.329.000	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 250.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 257.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 300.000.000	
	3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 800.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 1.353.095.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 810.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 23.773.174.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 96.060.000	
	f) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 167.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
15.	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	<u>Rp 8.353.430.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 247.000.000	
	2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 750.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 107.740.000	
	d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP	Rp 2.152.560.000	
	e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 530.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 3.847.830.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 89.100.000	
	f) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 129.200.000	
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	<u>Rp 36.097.253.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 250.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 261.746.000	
	b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 350.000.000	
	2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	3) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 200.000.000	
	4) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan		
	a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam	Rp 400.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 1.285.647.000	
	d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP	Rp 2.634.702.000	
	e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 810.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 29.205.558.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 99.600.000	
17.	PROVINSI BALI	<u>Rp 6.746.863.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 267.000.000	
	2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 750.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 190.469.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 530.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 4.266.424.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 86.770.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 156.200.000	
18.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	<u>Rp 12.435.196.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 231.076.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga	Rp 300.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 199.582.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 514.890.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 10.422.378.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 85.570.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 181.700.000	
19.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	<u>Rp 11.017.396.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 175.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 224.948.000	
	b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	
	c) Penataan Administrasi Kependudukan		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 171.594.000	
	d) Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 565.240.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 9.194.234.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 86.380.000	
20.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp 10.431.372.000	
	a) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 240.102.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 305.889.000	
	3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	c) Penataan Administrasi Kependudukan		DITJEN ADMINDUK
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 196.066.000	
	d) Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 595.090.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 8.027.305.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 86.620.000	
	e) Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 180.300.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
21.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	<u>Rp 12.127.219.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 175.000.000	
	2) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi		
	b) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government	Rp 302.760.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 267.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 317.266.000	
	b) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga	Rp 250.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 181.932.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 530.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 9.715.021.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 88.240.000	
22.	PROVINSI SULAWESI UTARA	<u>Rp 14.241.229.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 220.000.000	
	Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi		
	a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government	Rp 280.940.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 272.000.000	
	b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan	Rp 300.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga	Rp 300.000.000	
	3) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan		
	a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam	Rp 400.000.000	
	4) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 800.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 211.729.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 125.000.000	
	4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 810.000.000	
	5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 9.929.990.000	
	6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 94.570.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 197.000.000	
23.	PROVINSI GORONTALO	<u>Rp 6.958.518.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 230.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 232.384.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 215.655.000	
	c) Penataan Administrasi Kependudukan		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 147.614.000	
	d) Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 5.325.875.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 94.090.000	
	e) Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 162.900.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
24.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	<u>Rp 13.040.045.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 250.000.000	
	2) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi		
	a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government	Rp 217.590.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 257.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 200.000.000	
	3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 800.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 211.188.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 10.229.687.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 90.880.000	
	d) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 233.700.000	
25.	PROVINSI SULAWESI BARAT	<u>Rp 7.363.025.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 220.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 257.000.000	
	b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 350.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 200.000.000	
	3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 166.925.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 506.140.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 4.804.190.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 90.670.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 168.100.000	
26	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	<u>Rp 16.147.939.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 222.929.000	
	b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan	Rp 300.000.000	
	2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 175.092.000	
	d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP	Rp 2.560.091.000	
	e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 75.000.000	
	4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
	5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 11.518.637.000	
	6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 90.190.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	f) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 156.000.000	BADAN DIKLAT
27	PROVINSI SULAWESI SELATAN	<u>Rp 18.319.227.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	SETJEN
	b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 264.264.000 Rp 300.000.000	DITJEN PUM
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota 3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 200.000.000 Rp 300.000.000	
	4) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam	Rp 400.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 303.430.000	DITJEN DUKCAPIL

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 200.000.000	
	3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan		
	4) a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam	Rp 400.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 194.830.000	
	d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP	Rp 2.217.600.000	
	e) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 565.240.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 7.208.624.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 474.620.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 275.700.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 22.656.934.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 96.920.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 181.200.000	
30	PROVINSI MALUKU	<u>Rp 11.716.222.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 220.000.000	
	b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 287.000.000	
	b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 221.460.000	
	3) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 800.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 289.032.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	4) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan		
	5) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
	6) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 8.776.950.000	
	7) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 95.980.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 175.800.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
31	PROVINSI MALUKU UTARA	<u>Rp 8.956.616.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 220.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaran Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 281.772.000	
	b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan	Rp 300.000.000	
	2) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 242.032.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 530.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 6.478.632.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 97.180.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	 Rp 207.000.000	BADAN DIKLAT
32	PROVINSI PAPUA a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1) Perencanaan Program dan Anggaran a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	<u>Rp 56.962.673.000</u> Rp 220.000.000	 SETJEN
	2) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan 2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi b) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	 Rp 517.275.000 Rp 257.000.000 Rp 350.000.000 Rp 630.452.000 Rp 300.000.000 Rp 419.250.000	 DITJEN PUM DITJEN DUKCAPIL

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	4) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan		
	5) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
	6) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 53.605.666.000	
	7) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 113.030.000	
33	PROVINSI PAPUA BARAT	<u>Rp 24.084.704.000</u>	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
	1) Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 220.000.000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 232.000.000	
	2) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 373.365.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 234.294.000	
	d) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
	4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
	a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 22.113.795.000	
	5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 101.250.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 260.000.000	

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 66 Tahun 2010
TANGGAL : 31 Desember 2010

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2011
UNTUK MASING-MASING PROVINSI

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	<u>Rp 11.500.000.000</u>	
	a. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Kab. Aceh Utara	Rp 1.500.000.000	
	b. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		
	- Kab. Aceh Timur	Rp 2.675.000.000	
	- Kab. Aceh Tengah	Rp 2.675.000.000	
	- Kab. Aceh Selatan	Rp 1.650.000.000	
	c. Bina Pembangunan Daerah		DITJEN BINA BANGDA
	1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda		
	a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah		
	- Kab. Aceh Besar	Rp 3.000.000.000	
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	<u>Rp 36.643.697.000</u>	
	a. Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
	- Kab. Karo	Rp 4.296.569.000	
	- Kab. Tapanuli Tengah	Rp 1.894.788.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Kab. Serdang Bedagai	Rp 1.290.000.000	
	c. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		DITJEN PMD
	1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Pembangunan Kantor Desa		
	- Kab. Labuan Batu Utara	Rp 600.000.000	
	2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Tanah Karo	Rp 312.340.000	
	3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		
	- Kab. Phak Phak Barat	Rp 5.750.000.000	
	- Kab. Tapanuli Selatan	Rp 5.750.000.000	
	- Kab. Mandailing Barat	Rp 5.750.000.000	
	d. Bina Pembangunan Daerah		DITJEN BINA BANGDA
	1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda		
	a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah		
	- Kab. Asahan	Rp 2.000.000.000	
	- Kab. Labuhan Batu	Rp 7.000.000.000	
	- Kota Padang Asahan	Rp 2.000.000.000	
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	<u>Rp 22.800.000.000</u>	
	a. Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah		DITJEN OTDA
	1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
	a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR		
	- Kab. Tanah Datar	Rp 100.000.000	
	- Kab. Solok	Rp 100.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		
	- Kab. Pasaman	Rp 5.750.000.000	
	- Kab. Solok Selatan	Rp 5.750.000.000	
	- Kab. Pesisir Selatan	Rp 2.675.000.000	
	- Kab. Padang Pariaman	Rp 2.675.000.000	
	- Kab. Agam	Rp 5.750.000.000	
4.	PROVINSI RIAU	<u>Rp424.680.000</u>	
	a. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Indragiri Hilir	Rp 212.340.000	
	- Kab. Siak	Rp 212.340.000	
5.	PROVINSI BENGKULU	<u>Rp 13.987.340.000</u>	
	a. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Kepahiang	Rp 212.340.000	
	2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		
	- Kab. Bengkulu Utara	Rp 2.675.000.000	
	- Kab. Bengkulu Selatan	Rp 1.650.000.000	
	- Kab. Kaur	Rp 5.750.000.000	
	- Kab. Lebong	Rp 3.700.000.000	
6.	PROVINSI JAMBI	<u>Rp1.000.000.000</u>	
	a. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Kab. Kerinci	Rp 1.000.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	<u>Rp3.248.857.000</u>	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
	- Kab. OKU	Rp 2.924.177.000	
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Banyuasin	Rp 212.340.000	
	- Kab. Ogan Ilir	Rp 112.340.000	
8.	PROVINSI LAMPUNG	<u>Rp3.194.249.000</u>	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
	- Kab. Lampung Selatan	Rp 1.857.229.000	
	b. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Kab. Tulang Bawang	Rp 1.000.000.000	
	c. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Lampung Selatan	Rp 112.340.000	
- Kab. Tanggamus	Rp 112.340.000		
- Kab. Pesawaran	Rp 112.340.000		
9.	PROVINSI BANTEN	<u>Rp3.348.558.000</u>	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR		
	- Kab. Lebak	Rp 100.000.000	
	2) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
	- Kab. Pandeglang	Rp 2.848.558.000	
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Pembangunan Kantor Desa		
	- Kab. Pandeglang	Rp 400.000.000	
10.	PROVINSI JAWA BARAT	<u>Rp 10.138.067.000</u>	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
	a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR		
	- Kab. Bandung	Rp 100.000.000	
	2) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
	- Kota Cirebon	Rp 1.805.974.000	
	- Kab. Kuningan	Rp 3.041.728.000	
	- Kab. Cirebon	Rp 2.052.781.000	
	- Kab. Subang	Rp 2.688.224.000	
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Sukabumi	Rp 112.340.000	
	- Kab. Cianjur	Rp 112.340.000	
	- Kab. Garut	Rp 112.340.000	
	- Kab. Karawang	Rp 112.340.000	
11.	PROVINSI JAWA TENGAH	<u>Rp 11.142.581.000</u>	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan		
	a) Daerah-ILGR		
	- Kab. Kebumen	Rp 100.000.000	
	- Kab. Magelang	Rp 100.000.000	
	2) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
	- Kab. Wonogiri	Rp 2.729.158.000	
	- Kab. Banjarnegara	Rp 3.254.374.000	
	- Kab. Klaten	Rp 1.867.132.000	
	- Kab. Sragen	Rp 2.542.557.000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Pati	Rp 212.340.000	
	- Kab. Cilacap	Rp 112.340.000	
	- Kab. Klaten	Rp 112.340.000	
	- Kab. Banjarnegara	Rp 112.340.000	
12.	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	<u>Rp424.680.000</u>	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
	Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan		
	a) Daerah-ILGR		
	- Kab. Bantul	Rp 100.000.000	
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Bantul	Rp 112.340.000	
	- Kab. Gunung Kidul	Rp 212.340.000	
13.	PROVINSI JAWA TIMUR	<u>Rp 19.721.962.000</u>	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
	Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan		
	a) Daerah-ILGR		
	- Kab. Ngawi	Rp 100.000.000	
	- Kab. Lamongan	Rp 100.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja		
	b. Daerah		
	1) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
	- Kab. Nganjuk	Rp 2.008.174.000	
	- Kab. Bojonegoro	Rp 2.646.507.000	
	- Kab. Gresik	Rp 2.304.941.000	
	- Kab. Sampang	Rp 2.931.216.000	
	- Kab. Kediri	Rp 2.417.498.000	
	- Kota Malang	Rp 2.964.266.000	
	c. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Prov. Jawa Timur	Rp 2.000.000.000	
	- Kab. Ponorogo	Rp 1.000.000.000	
	d. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		DITJEN PMD
	1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Pembangunan Kantor Desa		
	- Kab. Magetan	Rp 600.000.000	
	2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Gresik	Rp 112.340.000	
	- Kab. Pamekasan	Rp 212.340.000	
	- Kab. Bojonegoro	Rp 112.340.000	
	- Kab. Magetan	Rp 212.340.000	
14.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp5.437.020.000	
	a. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Prov. Kalimantan Barat	Rp 2.000.000.000	
	- Kab. Kapuas Hulu	Rp 1.000.000.000	
	- Kota Singkawang	Rp 1.200.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Pembangunan Kantor Desa		
	- Kab. Kubu Raya	Rp 600.000.000	
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Kubu Raya	Rp 212.340.000	
	- Kab. Sintang	Rp 212.340.000	
	- Kab. Landak	Rp 212.340.000	
15.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	<u>Rp2.212.340.000</u>	
	a. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Prov. Kalimantan Selatan	Rp 2.000.000.000	
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Tanah Laut	Rp 212.340.000	
16.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	<u>Rp424.680.000</u>	
	a. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Nunukan	212.340.000	
	- Kab. Kutai Kertanegara	212.340.000	
17.	PROVINSI SULAWESI UTARA	<u>12.612.340.000</u>	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
	a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR		
	- Kab. Bolaang Mongondow	100.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Kab. Kep. Sangihe	1.500.000.000	
	c. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		DITJEN PMD
	1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Pembangunan Kantor Desa		
	- Kab. Bolaang Mongondow Timur	600.000.000	
	2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		
	- Kab. Kep. Sangihe	3.700.000.000	
	- Kab. Minahasa	1.650.000.000	
	- Kab. Minahasa Utara	1.650.000.000	
	- Kab. Bolaang Mongondow	1.650.000.000	
	- Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.650.000.000	
	3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Minahasa	112.340.000	
18.	PROVINSI GORONTALO	<u>100.000.000</u>	
	a. Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	-	DITJEN OTDA
	1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
	Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan		
	a) Daerah-ILGR		
	- Kab. Boalemo	100.000.000	
19.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	<u>2.637.020.000</u>	
	a. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Kota Palu	1.500.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Pembangunan Kantor Desa		
	- Kab. Parigi Moutong	600.000.000	
	2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Donggala	212.340.000	
	- Kab. Morowali	212.340.000	
	- Kab. Parigi Moutong	112.340.000	
20.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	<u>15.426.910.000</u>	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
	- Kab. Buton	2.898.951.000	
	- Kota Bau-Bau	3.103.279.000	
	b. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Prov. Sulawesi Tenggara	2.000.000.000	
	c. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Buton	212.340.000	
	- Kab. Kolaka	212.340.000	
	2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		
	- Kab. Buton	3.700.000.000	
	- Kab. Kolaka	1.650.000.000	
	- Kab. Muna	1.650.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
21.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	<u>44.274.680.000</u>	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
	a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR		
	- Kab. Bulukumba	100.000.000	
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Wajo	212.340.000	
	- Kab. Maros	212.340.000	
	2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		
	- Kab. Wajo	1.650.000.000	
	- Kab. Maros	1.650.000.000	
	- Kab. Tana Toraja	5.750.000.000	
	- Kab. Toraja Utara	4.100.000.000	
	- Kab. Luwu Utara	4.100.000.000	
	c. BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda		
	a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah		
	- Kab. Wajo	2.000.000.000	
- Kab. Maros	2.500.000.000		
- Kab. Jeneponto	5.000.000.000		
- Kab. Takalar	2.500.000.000		
- Kab. Bantaeng	2.500.000.000		
- Kab. Barru	2.000.000.000		
- Kota Makassar	10.000.000.000		
22.	PROVINSI SULAWESI BARAT	<u>6.600.000.000</u>	
	a. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Fasilitas Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Prov. Sulawesi Barat	2.500.000.000	
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitas Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) Fasilitas Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		
	- Kab. Mamasa	4.100.000.000	
23.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	<u>5.696.825.000</u>	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
	a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
	- Kab. Lombok Barat	2.778.286.000	
	- Kab. Lombok Tengah	1.981.519.000	
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Pembangunan Kantor Desa		
	- Kab. Sumbawa	600.000.000	
	2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Sumbawa	112.340.000	
	- Kab. Lombok Barat	112.340.000	
	- Kab. Lombok Timur	112.340.000	
24.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	<u>4.712.340.000</u>	
	a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Kab. Kupang	1.000.000.000	
	2) Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Fasilitas Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Kab. Sumba Barat Daya	1.500.000.000	
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kupang	212.340.000	
	c. BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda		
	a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah - Kab. Manggarai	2.000.000.000	
25.	PROVINSI MALUKU	<u>2.000.000.000</u>	
	a. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Kab. Maluku Tenggara Barat	2.000.000.000	
26.	PROVINSI MALUKU UTARA	<u>1.000.000.000</u>	
	a. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Fasilitas Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Kota Ternate	1.000.000.000	
27.	PROVINSI PAPUA	<u>13.362.500.000</u>	
	a. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	- Prov. Papua	2.000.000.000	
	- Kab. Keerom	2.500.000.000	
	- Kab. Pegunungan Bintang	2.500.000.000	
	- Kab. Merauke	2.000.000.000	
	- Kab. Boven digoel	1.000.000.000	
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		
	- Kab. Jayapura	1.681.250.000	
	- Kab. Yapenwaropen	1.681.250.000	
28.	PROVINSI PAPUA BARAT	<u>5.362.500.000</u>	
	a. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Prov. Papua Barat	2.000.000.000	
	b. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		
	- Kab. Manokwari	1.681.250.000	
	- Kab. Sorong Selatan	1.681.250.000	

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI